

**PENGARUH KEMANDIRIAN DAERAH, EFEKTIVITAS PENDAPATAN
ASLI DAERAH, DAN KETERGANTUNGAN DAERAH TERHADAP
BELANJA MODAL DENGAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI
(STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI LAMPUNG)**



**UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JAKARTA**

Diajukan Oleh:

YULIANA EKA PURWATI

NIM : 127239102

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR
MAGISTER AKUNTANSI**

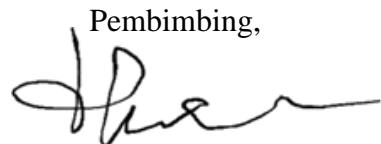
2024

PERSETUJUAN JUDUL TESIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI dan BISNIS
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN TESIS

NAMA : YULIANA EKA PURWATI
NO. MAHASISWA : 127239102
PROGRAM : MAGISTER AKUNTANSI
BIDANG KONSENTRASI : AKUNTANSI KEUANGAN
JUDUL TESIS : PENGARUH KEMANDIRIAN DAERAH,
EFEKТИVITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH,
DAN KETERGANTUNGAN DAERAH
TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI
VARIABEL PEMODERASI (STUDI PADA
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI LAMPUNG)

Jakarta, Juni 2024

Pembimbing,

Dr. Amrie Firmansyah

PENGESAHAN TESIS

FAKULTAS EKONOMI & BISNIS

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

TANDA PENGESAHAN TESIS

NAMA : Yuliana Eka Purwati

NIM : 127239102

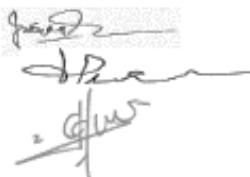
PROGRAM STUDI : S.2 AKUNTANSI

JUDUL TESIS

PENGARUH KEMANDIRIAN DAERAH, EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN KETERGANTUNGAN DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI
(STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA)

Telah diuji pada sidang Tesis pada tanggal 6 Juli 2024 dan dinyatakan lulus dengan majelis penguji majelis penguji terdiri dari

1. Ketua : Herlin Tundjung
2. Anggota : Amrie Firmansyah
Julisar



Jakarta,

Pembimbing



Amrie Firmansyah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“Pengaruh Kemandirian Daerah, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, dan Ketergantungan Daerah Terhadap Belanja Modal Dengan Kualitas Laporan Keuangan Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung)”**. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Magister Akuntansi (S2) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Penulisan tesis ini dapat terwujud atas doa, dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bimbingan, bantuan, dorongan, dan petunjuk yang telah diberikan sehingga tesis ini dapat terselesaikan kepada :

1. Ibu Dr. Estralita Trisnawati, S.E., Ak., M.Si., C.A. selaku Ketua Program Magister Akuntansi Universitas Tarumanagara.
2. Bapak Dr. Amrie Firmansyah, S.E., M.M., M.AK., M.E., M.A., M.H., C.S.R.S., C.S.R.A selaku Dosen Pembimbing tesis atas waktu, perhatian, masukan, dan segala bimbingan serta arahan selama penulisan tesis ini.
3. Kepada Dekan dan seluruh dosen Program Magister Akuntansi Universitas Tarumanagara atas segala ilmu dan pengalaman berharga yang telah diberikan baik pada saat perkuliahan maupun di luar waktu perkuliahan kepada penulis.

4. Segenap staf administrasi dan perpustakaan Program Magister Akuntansi Universitas Tarumanagara atas segala bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan perkuliahan dan keperluan tesis.
5. Pimpinan dan pelaksana pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penulian tesis ini.
6. Kedua orang tua dan adik-adik terkasih yang selalu mendoakan, mendorong, dan memberikan semangat kepada penulis dalam membuat tesis ini.
7. Rekan-rekan Program Magister Akuntansi Universitas Tarumanagara Angkatan 2023 dan rekan-rekan kerja pada Badan Pemeriksa Keuangan atas dukungan dan bantuan dalam penulisan tesis ini.
8. Keluarga, saudara, dan teman-teman yang telah memberikan doa, perhatian, bantuan, dan dorongan kepada penulis selama penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta waktu penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran membangun dari semua pihak untuk tesis ini agar menjadi masukan bagi penulis dan menambah pengetahuan.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun kita bersama.

Jakarta, Juli 2024

Penulis

ABSTRAK

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Tujuan penelitian untuk menguji secara empiris pengaruh kemandirian daerah, efektivitas PAD, dan ketergantungan daerah terhadap belanja modal dengan kualitas laporan keuangan sebagai variabel pemoderasi. Data penelitian berupa 15 LKPD Audited pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung TA 2013-2022. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 148 data observasi berdasarkan teknik sampling jenuh. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda untuk data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian daerah dan efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Ketergantungan daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Kualitas laporan keuangan dapat memoderasi pengaruh ketergantungan daerah terhadap belanja modal. Penelitian ini memiliki kontribusi praktis yang dapat digunakan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kebijakan dalam pengalokasian anggaran belanja modal di daerah.

Kata kunci : Belanja modal; Kemandirian daerah; Efektifitas PAD; Kualitas laporan keuangan

ABSTRACT

Capital expenditures are budget expenditures for acquiring fixed assets and other assets that provide benefits for more than one accounting period. This study examines the influence of regional independence, PAD effectiveness, and regional dependence on capital expenditure, with financial reports' quality as a moderating variable. The study uses 15 financial statements of district/city governments in Lampung Province from 2013 to 2022. The sample used in this research was 148 observation data. The analysis technique used is multiple linear regression analysis for panel data. This study indicates that regional independence and PAD effectiveness do not affect capital expenditure. Regional dependence positively affect on capital expenditure. The quality of financial reports can moderate the influence of regional dependence on capital expenditure. This study has practical contributions that can be used by the Ministry of Home Affairs and Regional Government to improve policies in allocating capital expenditure budgets in the regions.

Key words : Capital expenditure; Regional independence; PAD effectiveness; Regional dependence; Financial reporting quality

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN JUDUL TESIS	i
PENGESAHAN TESIS	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Identifikasi Masalah	12
1.3 Pembatasan Masalah	13
1.4 Perumusan Masalah	13
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
BAB II LANDASAN TEORI	16
2.1 Definisi Konseptual Variabel	16
2.2 Kaitan Antar Variabel	31
2.3 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis	40
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1 Desain Penelitian	42
3.2 Populasi dan Teknik Pemilihan Sampel	42

3.3	Operasionalisasi Variabel	43
3.4	Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		50
4.1	Hasil Penelitian.....	50
4.2	Pembahasan	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		70
5.1.	Kesimpulan	70
5.2.	Saran	72
DAFTAR PUSTAKA		73
LAMPIRAN		79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		88

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Opini LKPD Pemda di Provinsi Lampung TA 2013-2022.....	11
Tabel 2.1. Klasifikasi Kemandirian Daerah.....	22
Tabel 2.2. Klasifikasi Efektivitas PAD	25
Tabel 2.3 Klasifikasi Ketergantungan Daerah	27
Tabel 3.1. Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	43
Tabel 4.1 Hasil Statistik Deskriptif.....	50
Tabel 4.2 Hasil Uji <i>Chow</i>	52
Tabel 4.3 Hasil Uji <i>Hausman</i>	53
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas	54
Tabel 4.5 Hasil Uji Heteroskedastisitas	55
Tabel 4.6 Hasil Analisis Regresi Data Panel (<i>Fixed Effect</i>)	56
Tabel 4.7 Hasil Uji F.....	58
Tabel 4.8 Hasil Uji T	59
Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	60
Tabel 4.10 Hasil Regresi Dengan Variabel Pemoderasi	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Anggaran Belanja Modal Pemda di Provinsi Lampung 2013-2022 ...	2
Gambar 1.2. Persentase Belanja Modal TA 2013-2022.....	3
Gambar 1.3. Jumlah Puskesmas Tahun 2013-2022	5
Gambar 1.4. Jumlah Puskesmas per Jumlah Penduduk Tahun 2013-2022	5
Gambar 2.1. Realisasi TKDD Tahun 2013-2022.....	26
Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Pengujian Tahun 2013-2022	79
Lampiran 2 Surat Pernyataan Keaslian Tesis	86
Lampiran 3 Hasil Pemeriksaan Turnitin	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022, penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dilakukan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah (Fajriati dkk., 2022). Otonomi daerah memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dan antar Pemerintah Daerah (Pemda), potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara (UU Nomor 23, 2014). Pemerintah pusat bertanggung jawab atas urusan agama, pertahanan dan keamanan nasional, sistem peradilan, kebijakan fiskal dan moneter, urusan luar negeri dan fungsi khusus lainnya seperti perencanaan ekonomi makro dan standar nasional (Akita dkk., 2021). Selain itu, salah satu konsekuensi dari otonomi daerah adalah Pemda mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam melaksanakan pembangunan daerah serta memberikan pelayanan kepada masyarakat (Kartikasari & Rohman, 2019). Bentuk pelayanan kepada masyarakat diantaranya melalui penyediaan fasilitas layanan publik seperti penyediaan jalan yang memadai sebagai penunjang perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penyediaan sarana dan prasarana

di bidang kesehatan dan pendidikan. Pengeluaran pada sektor kesehatan dan pendidikan akan mengeksplorasi pertumbuhan ekonomi (Paudel, 2023).

Penyediaan jalan yang memadai serta sarana dan prasarana di bidang kesehatan dan pendidikan diselenggarakan oleh Pemda menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui anggaran belanja modal. Suandani (2021) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Kondisi anggaran belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung selama periode 10 (sepuluh) tahun terakhir (2013-2022) menunjukkan kecenderungan fluktuatif sebagaimana disajikan pada Gambar 1.1. di bawah ini.

Gambar 1.1. Anggaran Belanja Modal Pemda di Provinsi Lampung 2013-2022

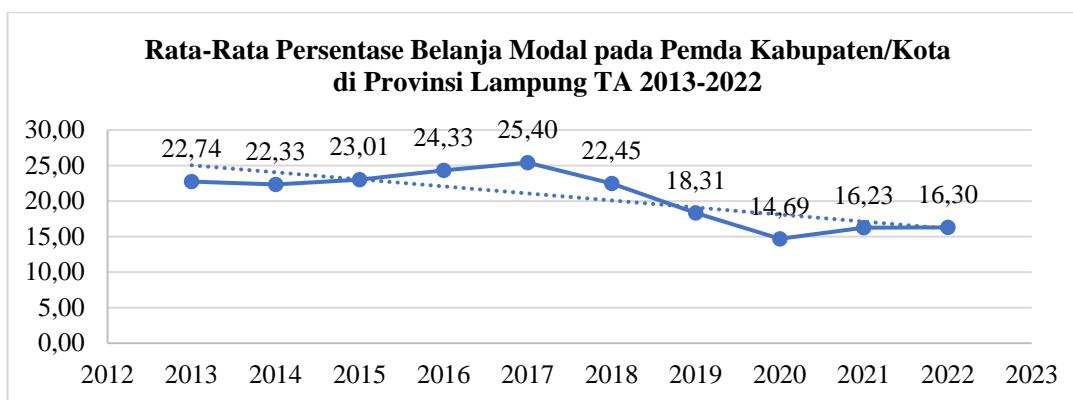


Sumber: LHP BPK, diolah

Berdasarkan Gambar 1.1. di atas, nilai anggaran belanja modal tertinggi pada Tahun 2017 yaitu sebesar Rp5,92 Triliun. Pada Tahun 2018-2020 nilai anggaran belanja modal mengalami penurunan menjadi Rp3,55 Triliun pada Tahun 2020. Sementara itu pada Tahun 2021-2022 anggaran belanja modal kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp4,05 Triliyun pada Tahun 2022.

Selanjutnya jika dibandingkan dengan total belanja daerah, rata-rata persentase belanja modal pada Pemda kabupaten/kota di Provinsi Lampung TA 2022 sebesar 16,30% dari total belanja daerah. Rincian rata-rata persentase belanja modal pada Pemda kabupaten/kota di Provinsi Lampung selama periode 10 (sepuluh) tahun terakhir (2013-2022) disajikan pada Gambar 1.2 berikut ini.

Gambar 1.2. Persentase Belanja Modal TA 2013-2022



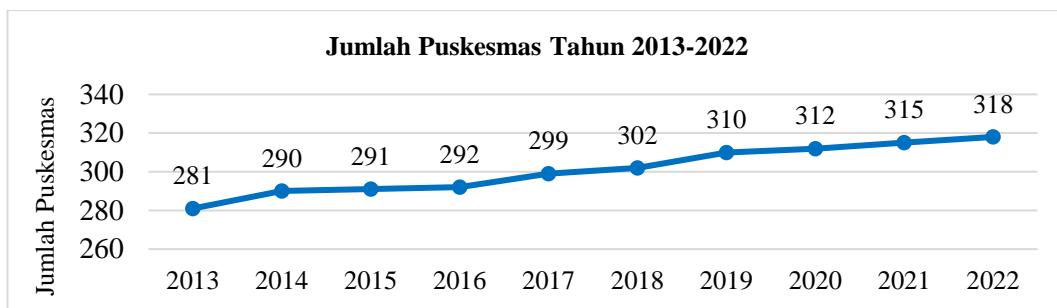
Sumber: LHP BPK Tahun 2014-2023, diolah

Perbandingan belanja modal di atas mengukur persentase jumlah anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan fisik dibandingkan seluruh anggaran belanja daerah. Persentase lebih dari 50% menunjukkan bahwa sebagian besar penggunaan anggaran untuk pelaksanaan pekerjaan insfrastruktur (LKPD Provinsi Lampung, 2023). Belanja modal pada TA 2013-2022 kurang dari 50% dari total belanja daerah menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung belum memprioritaskan belanja modal. Peningkatan pembangunan fisik perlu dilakukan karena kondisi jalan kabupaten/kota, puskesmas, dan sekolah yang secara kualitas lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata kondisi jalan, puskesmas, dan sekolah pada kabupaten/kota di Indonesia.

Berdasarkan data Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota Tahun 2022 yang dipublikasikan dalam situs Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menunjukkan bahwa persentase kemantapan jalan kabupaten/kota di Provinsi Lampung sebesar 47,33% (Ditjen Bina Marga, 2023). Angka tersebut masih di bawah rata-rata persentase kemantapan jalan kabupaten/kota pada seluruh provinsi di Indonesia yaitu sebesar 60,77% (Ditjen Bina Marga, 2022). Jika ditinjau dari kondisi permukaan jalan, maka jalan kabupaten/kota di Provinsi Lampung dengan kondisi baik sebesar 27,45% (Ditjen Bina Marga, 2022). Angka tersebut lebih rendah 11,94% jika dibandingkan dengan rata-rata persentase permukaan jalan dengan kondisi baik dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia yaitu sebesar 39,39% (Ditjen Bina Marga, 2022).

Berdasarkan Profil Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2022 yang dipublikasikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada bulan Juli 2023, di wilayah Provinsi Lampung terdapat 318 puskesmas (Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, 2023). Puskesmas sebagai salah satu pelayanan kesehatan yang keberadaannya sangat penting kerena terlibat langsung dengan masyarakat dan merupakan konsep dasar pelayanan kesehatan primer untuk masyarakat. Oleh karena itu, puskesmas sebagai unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota berperan sebagai penanggung jawab penyelenggaraan upaya kesehatan untuk jenjang tingkat pertama. Gambar 1.3. berikut ini menunjukkan jumlah puskesmas di Provinsi Lampung dalam periode 10 tahun terakhir (2013-2022).

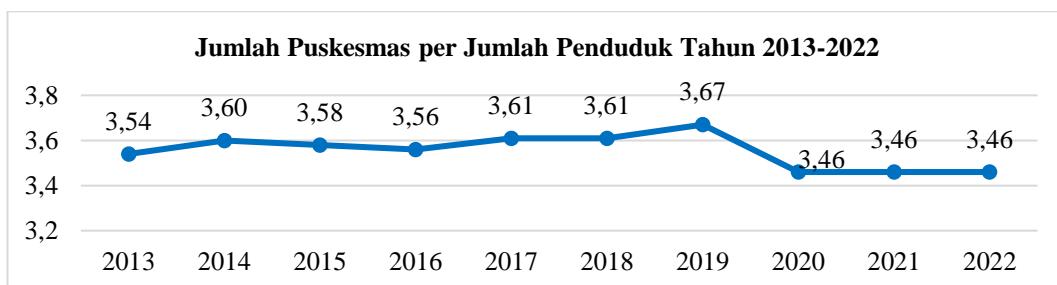
Gambar 1.3. Jumlah Puskesmas Tahun 2013-2022



Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2022, diolah

Berdasarkan Gambar 1.3. di atas dapat dilihat bahwa jumlah puskesmas di Provinsi Lampung meningkat setiap tahunnya. Namun demikian jika dibandingkan dengan konsep wilayah kerja puskesmas dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata sebanyak 20.000 penduduk, maka perbandingan jumlah puskesmas di Provinsi Lampung per 100.000 penduduk pada periode 10 tahun terakhir (2013-2022) sebesar 4 (3,46 s.d. 3,67). Angka tersebut belum memenuhi standar yaitu 5 puskesmas per 100.000 penduduk atau 1:20.000 penduduk. Gambar 1.4. berikut ini menunjukkan perbandingan jumlah puskesmas di Provinsi Lampung terhadap jumlah penduduk dalam periode 10 tahun (2013-2022).

Gambar 1.4. Jumlah Puskesmas per Jumlah Penduduk Tahun 2013-2022



Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2022, diolah

Berdasarkan data Statistik Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama 2022-2023 yang dipublikasikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada bulan Februari 2023, persentase ruang kelas dengan kondisi baik terhadap jumlah ruang kelas pada sekolah dasar negeri di Provinsi Lampung sebesar 38,28%. Persentase tersebut masih di bawah rata-rata persentase dari seluruh provinsi di Indonesia yaitu sebesar 42,26%. Sementara itu persentase ruang kelas dengan kondisi baik terhadap jumlah ruang kelas pada sekolah menengah pertama negeri di Provinsi Lampung sebesar 50,22%. Persentase tersebut masih di bawah rata-rata persentase dari seluruh provinsi di Indonesia yaitu sebesar 53,00%.

Berdasarkan teori keagenan, pemerintah daerah sebagai *agent* harus memberikan performa (kinerja) yang baik dan maksimal kepada rakyat sebagai *principal* (Halim & Abdullah, 2006). Dalam menilai keberhasilan organisasi publik, pemerintah daerah dapat mengukur kinerja dalam rangka perbaikan serta peningkatan performa di masa yang akan datang. Kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola sumber pendapatan daerah serta kondisi keuangan daerah dapat dinilai melalui pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah. Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa dalam proses pengalokasian sumber daya keuangan, pengambilan keputusan, perbaikan komunikasi kelembagaan, dan laporan pertanggungjawaban publik dapat didukung dengan adanya pengukuran kinerja keuangan daerah.

Pemda memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan pengalokasian sumber daya dan pendanaan lain yang digunakan untuk pengalokasian anggaran Pemda termasuk anggaran belanja modal. Otonomi daerah membuat perubahan

anggaran Pemda menjadi penganggaran berbasis kinerja (Kuntari, 2019). Kinerja keuangan daerah ditunjukkan melalui kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam pemberian bantuan untuk melaksanakan otonomi daerah. Analisis keuangan daerah merupakan salah satu cara dalam pengukuran kinerja pemerintah daerah.

Kondisi anggaran belanja modal dengan kecenderungan fluktuatif dan persentase belanja modal yang kurang dari 50% di atas membuat pengujian faktor-faktor yang mempengaruhi penganggaran belanja modal menjadi penting untuk dilakukan. Hasil penelitian sebelumnya telah menguji analisis keuangan dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal diantaranya dilakukan dengan efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Arif & Arza, 2018; Indiyanti & Rahyuda, 2018; Purnamawati, 2019; Novita & Nurhasanah, 2020; Wibisono dkk., 2021; Andani, 2022; Darmastuti dkk., 2022; Fajriati dkk., 2022), efisiensi keuangan daerah (Arif & Arza, 2020; Indiyanti & Rahyuda, 2018; Novita & Nurhasanah, 2020; Wibisono dkk., 2021; Andani, 2022; Darmastuti dkk., 2022; Fajriati dkk., 2022), kemandirian daerah (Arif & Arza, 2018; Indiyanti & Rahyuda, 2018; Purnamawati, 2019; Samudra & Handayani, 2020; Wibisono dkk., 2021; Andani, 2022; Darmastuti dkk., 2022), derajat desentralisasi fiskal (Indiyanti & Rahyuda, 2018; Purnamawati, 2019; Novita & Nurhasanah, 2020; Samudra & Handayani, 2020; Wibisono dkk., 2021), derajat kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Indiyanti & Rahyuda, 2018; Novita & Nurhasanah, 2020), ketergantungan daerah (Purnamawati, 2019; Nurhasanah dkk., 2023; Novita & Nurhasanah, 2020; Khafif & Romandhon, 2022), tingkat pemberian bantuan SiLPA (Indiyanti & Rahyuda, 2018; Novita & Nurhasanah, 2020),

jumlah penduduk (Samudra & Handayani, 2020), keserasian belanja daerah (Arif & Arza, 2018), pertumbuhan ekonomi (Samudra & Handayani, 2020), dan pertumbuhan PAD (Andani, 2022). Penelitian-penelitian tersebut menggunakan data sekunder dalam satu atau lebih Pemda diantaranya pada Provinsi Sumatera Barat, Bali, Lampung, Jambi, Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta dengan periode bervariasi 5, 6, dan 10 tahun mulai dari Tahun 2012 s.d. Tahun 2020.

Penelitian ini menguji secara empiris pengaruh kemandirian daerah, efektifitas PAD, dan ketergantungan daerah terhadap belanja modal. Kemandirian daerah yang tinggi mengindikasikan kinerja keuangan yang baik dari suatu pemerintah daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam pembiayaan mandiri atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik menunjukkan kemandirian pemerintah daerah (Arif & Arza, 2018). Kemandirian daerah mencerminkan keadaan otonomi suatu daerah yang diukur dengan membandingkan pendapatan asli daerah dan jumlah total pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan pemerintah pusat, provinsi, dan pinjaman (Indiyanti & Rahyuda, 2018). Indiyanti & Rahyuda (2018), Purnamawati (2019), Samudra & Handayani (2020), Wibisono dkk. (2021), dan Darmastuti dkk. (2022) menyimpulkan bahwa semakin tinggi kemandirian daerah maka pengalokasian anggaran belanja modal juga semakin tinggi. Sementara itu penelitian Arif & Arza (2018), Kartikasari & Rohman (2019), dan Andani (2022) menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Adanya ketidakseragaman pada hasil penelitian sebelumnya, maka pengujian pengaruh kemandirian daerah terhadap belanja modal menjadi menarik untuk dilakukan.

Kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD agar mencapai target digambarkan melalui efektivitas PAD. Pencapaian PAD yang lebih besar dari targetnya, seharusnya dapat meningkatkan pengalokasikan pada belanja modal (Indiyanti & Rahyuda, 2018). Kinerja yang baik dari suatu pemerintah daerah diantaranya dinilai dari semakin tingginya efektivitas PAD (Halim, 2019). Purnamawati (2019) menyimpulkan bahwa semakin tinggi efektivitas PAD maka anggaran belanja modal akan semakin tinggi. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Arif & Arza (2018), Indiyanti & Rahyuda (2018), Andriyani (2020), Wibisono dkk. (2021), Andani (2022), Darmastuti dkk. (2022), dan Fajriati (2022) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Adanya ketidakseragaman pada hasil penelitian sebelumnya, maka pengujian pengaruh efektivitas PAD terhadap belanja modal menjadi menarik untuk dilakukan.

Tingkat ketergantungan pemerintah daerah diukur berdasarkan perbandingan antara realisasi dana perimbangan dan jumlah realisasi pendapatan daerah. Semakin rendah ketergantungan daerah yang dihasilkan maka semakin baik kemampuan Pemda dalam membiayai pembangunan sendiri. Ketergantungan daerah di atas 50% berarti tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat masih tinggi (LKPD Provinsi Lampung, 2023). Nurhasanah dkk. (2023) menyatakan bahwa ketergantungan daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Novita & Nurhasanah (2020) dan Khafif & Romandhon (2022) menyimpulkan bahwa semakin rendah tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat maka semakin tinggi pengalokasian anggaran belanja modal. Sementara itu Purnamawati

(2019) menyimpulkan bahwa ketergantungan daerah tidak berpengaruh langsung terhadap belanja modal. Dengan adanya perbedaan pada hasil penelitian sebelumnya, maka pengujian pengaruh ketergantungan daerah terhadap belanja modal menjadi perlu untuk dilakukan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu adanya variabel pemoderasi yaitu kualitas laporan keuangan yang diprososikan dengan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK setiap tahunnya. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk tanggung jawan pemerintah daerah selaku *agent* kepada rakyat selaku *principal* atas pengelolaan sumber daya ekonomi suatu daerah (Rangkuti, 2022). Dalam laporan keuangan, informasi yang berpengaruh kepada rakyat sebagai *principal* dalam proses pengambilan keputusan harus disajikan secara sepenuhnya (*full disclosure*) oleh pemerintah daerah sebagai *agent* (Zulkarnain & Andriansyah, 2018). Selain itu, penelitian ini menggunakan tingkat pemberian SiLPA dan ukuran Pemda sebagai variabel kontrol. Variabel kontrol digunakan agar fokus penelitian tentang pengaruh kemandirian daerah, efektivitas PAD, dan ketergantungan daerah terhadap belanja modal menjadi tepat serta model regresi yang diperoleh untuk memprediksi variabel dependen menjadi lebih baik.

Informasi terkait kemandirian daerah, efektifitas PAD, dan ketergantungan daerah diperoleh dari LKPD yang dimanfaatkan sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan, evaluasi pengelolaan keuangan daerah, merencanakan APBD termasuk pengalokasian anggaran belanja modal dan kontrol internal

Pemda. Setiap tahunnya, Pemda menerbitkan LKPD yang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemda atas kinerja pengelolaan keuangan daerah. Penilaian atas kewajaran LKPD dilakukan oleh BPK setelah memeriksa LKPD dengan mengeluarkan pernyataan berupa opini. Hasil pemeriksaan BPK atas LKPD dinyatakan dalam 4 opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) termasuk Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Penjelasan kewajaran terhadap informasi LKPD disajikan atas dasar kriteria opini sesuai dengan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Kriteria opini tersebut yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Hasil pemeriksaan BPK atas LPKD Pemda di Provinsi Lampung Tahun Anggaran (TA) 2022 menunjukkan terdapat 7 LKPD Pemda dengan opini WTP, 5 LKPD Pemda dengan opini WTP-WDP, dan masih terdapat 3 LKPD Pemda dengan opini WDP. Tabel 1.1. berikut ini menunjukkan opini LKPD Pemda di Provinsi Lampung selama periode 10 tahun terakhir (2013-2022).

Tabel 1.1. Opini LKPD Pemda di Provinsi Lampung TA 2013-2022

No.	Tahun Anggaran	WTP	WTP-DPP	WDP	TW	TMP	Jumlah Pemda Kabupaten/Kota
1	2013	5	0	8	1	0	14
2	2014	5	3	6	0	1	15
3	2015	4	6	4	0	1	15
4	2016	11	1	3	0	0	15
5	2017	11	1	3	0	0	15
6	2018	10	3	2	0	0	15

No.	Tahun Anggaran	WTP	WTP-DPP	WDP	TW	TMP	Jumlah Pemda Kabupaten/Kota
7	2019	12	1	2	0	0	15
8	2020	12	1	2	0	0	15
9	2021	12	1	2	0	0	15
10	2022	7	5	3	0	0	15

Sumber: LHP BPK, diolah

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 diantaranya menjelaskan karakteristik yang menggambarkan kualitas laporan keuangan yang baik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dengan demikian laporan keuangan akan dapat bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan pemerintah daerah. Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas pemerintah daerah, maka laporan keuangan harus disajikan secara berkualitas sehingga dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah (Rangkuti, 2022). Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat dilakukan oleh pimpinan organisasi melalui penyajian laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan dengan kualitas yang rendah dapat menyebabkan kekeliruan pada proses analisis dan pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan (Firmansyah dkk., 2022). Termasuk dalam pengambilan keputusan ini yaitu terkait pengalokasian anggaran belanja modal untuk penyediaan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

- a. Kualitas penyediaan jalan serta sarana dan prasarana di bidang kesehatan dan pendidikan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung masih di bawah rata-rata dari seluruh provinsi di Indonesia.
- b. Nilai anggaran belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung dalam periode 10 tahun terakhir (2013-2022) menunjukkan kecenderungan fluktuatif.
- c. Rata-rata persentase belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung dalam periode 10 tahun terakhir (2013-2022) kurang dari 50% dari total belanja daerah menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Lampung belum memprioritaskan belanja modal.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan penelitian hanya pada informasi keuangan yang ada dalam LKPD dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD kabupaten/kota di Provinsi Lampung TA 2013 s.d. 2022.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

- a. Apakah kemandirian daerah berpengaruh terhadap belanja modal?
- b. Apakah efektivitas PAD berpengaruh terhadap belanja modal?
- c. Apakah ketergantungan daerah berpengaruh terhadap belanja modal?
- d. Apakah kualitas laporan keuangan dapat memoderasi pengaruh kemandirian daerah terhadap belanja modal?

- e. Apakah kualitas laporan keuangan memoderasi pengaruh efektivitas PAD terhadap belanja modal?
- f. Apakah kualitas laporan keuangan memoderasi pengaruh ketergantungan daerah terhadap belanja modal?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk menguji secara empiris pengaruh kemandirian daerah terhadap belanja modal.
- b. Untuk menguji secara empiris pengaruh efektivitas PAD terhadap belanja modal.
- c. Untuk menguji secara empiris pengaruh ketergantungan daerah terhadap belanja modal.
- d. Untuk menguji secara empiris peran moderasi kualitas laporan keuangan dalam hubungan kemandirian daerah dan belanja modal.
- e. Untuk menguji secara empiris peran moderasi kualitas laporan keuangan dalam hubungan efektivitas PAD dan belanja modal.
- f. Untuk menguji secara empiris peran moderasi kualitas laporan keuangan dalam hubungan ketergantungan daerah dan belanja modal.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi berbagai pihak, diantaranya:

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat menambah pengembangan literatur dalam bidang akuntansi sektor publik serta melengkapi literatur terkait dengan pengalokasian belanja modal pada penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Bagi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan kebijakan dalam pengalokasian anggaran belanja modal di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afnisah, A. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara dan Jawa Timur dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating. *Tesis*. Universitas Sumatera Utara.
- Agustina, S. (2021). Tingkat kemandirian pemerintah kota Bandar Lampung tertinggi se-Lampung. <https://lampost.co/opini/tingkat-kemandirian-pemerintah-kota-bandar-lampung-tertinggi-se-lampung/>
- Akita, T, Riadi, M. A., & Rizal, A. (2021). Fiscal disparities in Indonesia in the decentralization era: Does general allocation fund equalize fiscal revenues?. *Regional Science Policy and Practice*, 13(6), 1842-1866.
- Alsmady, A. A. (2022). Quality of financial reporting, external audit, earnings power and companies performance: The case of Gulf Corporate Council Countries. *Research in Globalization*, 5.
- Andani, M. F. (2022). Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Di Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmiah Sosial Teknik*, 4(2).
- Andriyani, N., Mukhzarudfa, & Diah P A, E. D. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2014 – 2018). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Jambi*, 5(2), 132-144.
- ANAO (Australian National Audit Office). 2015. Public Sector Financial Statements High-Quality Reporting Through Good Governance and Process. *Better Practice Guide*. Commonwealth of Australia.
- Arens, Alvin A., Randal J. Elder, dan Mark, S. Beasley. 2012. *Auditing and Assurance Services-An Integrated Approach*. Fifteenth Edition. England: Pearson Education Inc.
- Arif, M. & Arza, F. I. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 – 2017. *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi*, 9(2), 21-36.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Laporan Hasil Reviu atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2020*. BPK RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022*. BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung.

- Chintya, K. D., & Maria, E. (2023). Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Dari Perspektif Teori Keagenan. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 586-601. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.7274>.
- Creswell, D., & Creswell, W.J. 2018. *Research Design : Qualitative, Quantitative & Mixed Methods Approaches* (5th ed). Sage Publications, Inc.
- Darise, N. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Indeks.
- Darmastuti, W. Y., Susilowati, E., & Tannar, O. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Proaksi*, 9(1), 1-13.
- Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. (2023). *Profil Kesehatan Provinsi Lampung Tahun 2022*. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2021). *Laporan Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah Periode 20 Desember s.d. 31 Desember 2021 Edisi XXV*. DJPK.
- Djaenuri, A. (2012). *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Ghalia Indonesia.
- Erawati, N. K. I., Yuniarta, G. A., dan Yasa, I. N. P. (2019). Analisis Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Badung. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 10(3), 356-367.
- Fajriati, C. E., Engkus, & Anwar, H. S. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011-2020. *Jurnal Moderat*, 8(3), 436-451.
- Firmansyah, A., Yuniar, M. R., & Arfiansyah, Z. (2022). Kualitas Laporan Keuangan di Indonesia: Transparansi Informasi Keuangan dan Karakteristik Pemerintah Daerah. *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia*, 4(2).
- Firmansyah, A., Arfiansyah, Z., & Yuniar, M. R.. (2022). Local Governments Financial Reporting in Papua and West Papua: Do Local Government Characteristics Matter?. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 14 (2), 139-147.
- Ghozali, I. (2019). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26 Edisi 10*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N. & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics*. McGraw-Hill.
- Halim, A. (2019). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN Yogyakarta.

- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan Masalah Keagenan di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2(1) : 53–64.
- Harahap, S. S. (2018). *Teori akuntansi, Edisi Revisi 2011*. Rajawali Pers.
- Hastuti, P. (2018). Desentralisasi Fiskal dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di indonesia. *Simposium Nasional Keuangan Negara*.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. *PSAK No. 16 Tentang Aset Tetap– edisi revisi 2011*. Penerbit Dewan Standar Akuntansi Keuangan: PT. Raja Grafindo
- Indiyanti, N. M. D. & Rahyuda, H. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 7(9), 4713-4746.
- Jati, B. P. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 21(1).
- Jensen, M., C., dan W. Meckling. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure. *Journal of Finance Economic*. 3, 305-360
- Kartikasari, M. A. & Rohman, A. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2015-2017). *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2) : 1-14.
- Ditjen Bina Marga. (2023). Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota. <https://data.pu.go.id/dataset/kemantapan-jalan-kabupaten>.
- Ditjen Bina Marga. (2022). Kondisi Permukaan Jalan Kabupaten/Kota. <https://data.pu.go.id/dataset/kondisi-permukaan-jalan-kabupatenkota>.
- Khafif, A. & Romandhon, R. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Perbankan Syariah*, 2 (2) 38-46.
- Kharismadani, D. A. & Hendarti, Y. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2014 - 2018. *Surakarta Accounting Review (SAREV)*, 2(2), 44-53.
- Kuntari, Y., Chariri, A., & Prabowo, T.J.W. (2019). Capital Expenditure of Local Government. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 23(1).

- Lukitawati, L. J. & Pringgabayu, D. (2020). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Journal of Accounting Taxing and Auditing*, 1(2).
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI.
- Marlianita, Y., & Saleh, S. A. (2020). Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Dan Rasio Tingkat Pembiayaan SiLPA Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 25-35. <https://doi.org/10.35313/iarj.v1i1.2357>.
- Marseno, B. & Mulyani, E. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumlah Penduduk Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat Tahun 2016-2019). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 3452-3467.
- Maula, M. I. A. & Wibowo, P. (2022). Meneropong Determinan Opini LKPD Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan*, 26(1), 23-37.
- Novita, I. & Nurhasanah, N. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Periode Tahun Anggaran 2012-2017). *Jurnal Buana Ilmu*, 4(2).
- Nurliza, Wike & Halmawati. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2010-2018). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2373-2390.
- Paudel, R. C. (2023). Capital expenditure and economic growth: A disaggregated analysis for Nepal. *Cogent Economics & Finance*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2191449>.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Prayuda, Y. M & Arifin, J. (2024). Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 6, 77-87.

Priyatno, D. (2014). *SPSS 22: Pengolahan Data Terpraktis*. CV Andi Offset.

Purnamawati, A. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Lampung. *Tesis*. Universitas Lampung.

Rangkuti, A. Z. (2022). Analisis Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sebagai Variabel Pemoderasi pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. *Tesis*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju, D. R. (2018). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Samudra, G. & Handayani, N. (2020). Pengaruh kemandirian, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk terhadap belanja modal pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(4), 1-20..

Siregar, A. S. (2019). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan pemerintah Daerah Kota Medan. *Tesis*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Suandani, K. P., & Astawa, I G. P. B.. (2021). Pengaruh Opini Audit, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 12(03), 728-739.

Sugiyono (2019). *Statistika untuk Penelitian*. CV Alfabeta.

Tulandi, V. M., Sabijono, H., & Rondonuwu, S. (2020). Analisis Efektivitas Pajak Parkir dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kotamobagu. *Jurnal EMBA*, 8(4), 381-388.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

- Wibisono, N., Indartini, M., & Rahayu, E. E.(2021). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Se-Bakorwil Madiun. *Jurnal Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 10(2), 83-88.
- Widiasmara, A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Total Aset dan Luas Wilayah, terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 2(1).
- Zulkarnain, Z. (2020). Analisis Rasio Keuangan Daerah Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *Cakrawala*, 3(1), 2620-8490.
- Zulkarnain, Z., & Andriansyah, R. (2018). Opini Audit BPK-RI dan Substansi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. *Cakrawala*, 1(1), 58–74.